



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU





BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 Nomor 2);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah dan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II PENYUSUNAN RENJA PD

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen yang disusun dengan mempedomani Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Pasal 3

(1) Renja PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

(2) Uraian secara rinci Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BAB III PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 10 NOVEMBER 2025

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ASMAR

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 10 NOVEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

BAMBANG SUPRIANTO

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 merupakan tahun Pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengamati pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Disamping mengoptimalkan program, kegiatan, sub kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selatpanjang, 12 November 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti



ROKHIZAL, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19700302 199304 1 001

DAFTAR ISI

Cover	
Perbup Rencana Kerja (RENJA) 2026	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN DINSOSP3AP2KB..	22
3.1 Tujuan, Sasaran Dan Arah Kebijakan.....	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
4.1 Matrik Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026.....	26
4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan	35
BAB V PENUTUP.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Capaian Program Kegiatan Sub Kegiatan Dinas SOSIALP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Berjalan.....	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial PPPA PPKB.....	23
Tabel 2.2	Arah Kebijakan Prioritas Dinas Sosial PPPA PPKB.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memuat ; tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan ; lokasi kegiatan; indikator kinerja; kelompok sasaran; pagu indikatif dan prakiraan maju.

Kedudukan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah merupakan rincian mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 (lima) tahun. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Meranti dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. dan merupakan akhir dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti, diperlukan perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasiskan perencanaan masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran dari para stakeholders yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabilitas.

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, telah merubah pola perencanaan yang ada, dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti digunakan sebagai pedoman penyusunan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undangn 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
25. **Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Nomor);**

26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No. 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 23);
30. **Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No. Tahun tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2029.**

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di masing-masing Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Program Pembangunan Daerah. Renja ini akan menjadi program, kegiatan, sub kegiatan strategis yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Kepulauan Meranti, APBD Provinsi maupun APBN.

Berkenaan dengan hal diatas, maka Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti bertujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama 1 tahun dan dijadikan acuan dalam merumuskan standar pengukuran kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya dijadikan landasan dalam Penyusunan APBD.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang :

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

Bab Ini berisikan tentang :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan ke II.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang :

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif
- 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan SubKegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II.

Secara Rinci realisasi program / kegiatan yang memenuhi dan tidak memenuhi target, faktor-faktor penyebab terpenuhi / tidak terpenuhi target kinerja program / kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian, kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor –faktor penyebab, terlampir dalam **tabel 1.1**

Tabel 1.1
Realisasi Capaian Program Kegiatan Sub Kegiatan Dinas SOSIALP3AP2KB
Kabupaten Kepulauan Meranti Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2025	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							I	II	III	IV											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5*100	15							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
I Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																					
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan aparatür, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95%	%	27.586.000.000	0	11.388.138.028	95	4.777.400.167	34	666.549.768	12	735.298.806							
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	290.000.000	86		71.818.400	29	27.008.000	21	5.674.000	6	-	-	-	27	5.674.000	113	77.492.400	77.93	26,72 Dinas Sosial P3AP2KB	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	80.000.000	5		28.972.000	3	11.668.000	0	-	1	-	-	-	1	-	6	28.972.000	40,00	36,22	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktihar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	140.000.000	66		42.846.400	22	15.340.000	19	5.674.000	3	-	-	-	22	5.674.000	88	48.520.400	80,00	34,66	
	Cakupan Pelaksanaan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	17.646.000.000	0		7.328.735.524	100	3.420.784.892	12	410.314.218	17	502.761.026	-	-	-	29	913.075.244	29	8.241.810.768	29,00	46,71 Dinas Sosial P3AP2KB
	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	17.202.000.000	81		7.328.735.524	20	3.420.784.892	17	410.314.218	3	502.761.026	-	-	-	20	913.075.244	101	8.241.810.768	67,33	47,91
	Percentase Terlaksanaanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.678.000.000	0		1.361.453.760	100	175.412.000	4	12.957.750	29	63.171.239	-	-	-	33	76.128.989	33	1.437.582.749	33,00	39,09 Dinas Sosial P3AP2KB
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	56.000.000	2		15.000.000	1	5.000.000	0	-	1	5.000.000	-	-	-	1	5.000.000	3	20.000.000	60,00	35,71
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	705.000.000	22		351.470.000	5	23.659.000	2	9.958.000	3	13.655.000	-	-	-	5	23.613.000	27	375.083.000	61,36	53,20
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000	3		56.000.000	1	6.000.000	0	-	0,5	3.000.000	-	-	-	0,5	3.000.000	3,5	59.000.000	70,00	49,17
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	Penyediaan barang Cetak dan penggantian	344.000.000	4		104.234.850	2	9.100.000	1	2.999.750	0	500.000	-	-	-	1	3.499.750	5	107.734.600	50,00	31,32
	Jumlah Dokumen Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	54.000.000	8		1.890.000	12	2.520.000	0	-	3	840.000	-	-	-	3	840.000	11	2.730.000	10,38	5,06
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.000.000	12		29.995.000	12	10.000.000	0	-	0	-	-	-	0	-	12	29.995.000	20,00	24,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.029.000.000	230		891.309.910	27	119.133.000	0	-	9	40.176.239	-	-	-	9	40.176.239	239	841.486.149	49,79	41,47
	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.763.000.000	0		60.149.000	100	70.038.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	60.149.000	0,00	3,41 Dinas Sosial P3AP2KB	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2025	Unit Perangkat Daerah Penangung Jawab			
							I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5*100	15							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16	Unit	160.000.000	0	-	2	23.485.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0,00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	37	Unit	398.000.000	3	60.149.000	4	46.553.000	0	-	0	-	-	-	0	-	3	60.149.000, 8,11		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	15	Kegiatan	2.742.000.000	8	2.050.475.692	3	1.060.105.775	3	233.603.800	0	168.366.541	-	-	3	401.970.341, 11	2.452.446.033	73,33, 89,44 Dinas Sosial P3AP2KB		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	75.000.000	24	10.000.000	12	5.000.000	12	4.991.000	0	-	-	-	12	4.991.000, 36	14.991.000, 60,00	19,99		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	667.000.000	36	233.745.022	12	157.369.455	3	6.312.800	3	20.166.541	-	-	6	26.479.341, 42	260.225.263, 70,00	39,01		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	2.000.000.000	35	1.806.729.770	12	897.736.320	3	222.300.000	3	148.200.000	-	-	6	370.500.000, 41	2.177.229.770, 68,33	108,86		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.236.000.000	0	515.505.362	100	24.051.500	16	4.000.000	4	1.000.000	-	-	20	5.000.000, 20	520.505.362, 20,00	42,11 Dinas Sosial P3AP2KB		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	194	Unit	170.000.000	110	115.521.362	23	10.051.500	0	-	0	-	-	0	-	110	115.521.362, 56,70	67,95		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	382	Unit	195.000.000	60	30.000.000	28	14.000.000	8	4.000.000	2	1.000.000	-	-	10	5.000.000, 70	35.000.000, 18,32	17,95		
II Meningkatnya Penanganan terhadap PPKS																					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Percentase PMKS dan KAT yang ditangani	84	%	842.000.000	10	306.587.000	82	97.624.000	0	2.200.000	40	-	-	-	40	2.200.000	50	308.787.000, 59,52	36,67	
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	55	%	279.000.000	12	128.764.000	50	57.624.000	0	-	9	-	-	-	9	-	21	128.764.000, 38,18	46,15 Dinas Sosial P3AP2KB	
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	125	Keluarga	110.000.000	42	13.822.000	30	18.268.000	0	-	0	-	-	-	0	-	42	13.822.000, 33,60	12,57	
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KA1	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	125	Keluarga	169.000.000	70	114.942.000	30	39.356.000	0	-	0	-	-	-	0	-	70	114.942.000, 56,00	68,01	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	77	%	563.000.000	0	177.823.000	75	40.000.000	0	2.200.000	0	-	-	-	0	2.200.000	0	180.023.000, 0,00	31,98 Dinas Sosial P3AP2KB	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	45	Orang	263.000.000	19	57.033.000	9	40.000.000	0	2.200.000	0	-	-	-	0	2.200.000	19	59.233.000, 42,22	22,52	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang terdapat dan Direhabilitasi	150,915	Orang	751.000.000	68,348	615.751.900	30,178	962.293.000	706	18.357.000	-	10.712.000	-	-	-	706	29.069.000	69,054	644.820.900, 45,76	85,86
	Kebutuhan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial	Percentase Peningkatan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial	69	%	376.000.000	0	302.788.000	52	869.059.000	0	4.314.000	30	7.612.000	-	-	30	11.926.000	30	314.714.000, 43,48	83,70 Dinas Sosial P3AP2KB	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2025	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							I	II	III	IV	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5*100	15							
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Penyediaan Pernakaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pernakaran Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	25.000.000	75	37.525.000	400	224.262.000	0	-	0	1.396.000	0	1.396.000	75	38.921.000	150.00	155,68	
		Penyediaan Sandung	Jumlah Orang yang Menerima Pakaiannya yang Tersedia dalam Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	25.000.000	0	-	290	210.224.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	25.000.000	14	16.481.000	120	101.901.000	0	-	0	-	0	-	14	16.481.000	140.00	65,92	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	25.000.000	5	24.154.000	10	21.084.000	0	-	0	-	0	-	5	24.154.000	33.33	96,62	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Orang	25.000.000	35	35.177.000	50	34.909.000	0	-	0	-	0	-	35	35.177.000	233.33	140,71	
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependidikan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependidikan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	25.000.000	11	13.861.000	10	24.900.000	0	1.362.000	1	100.000	0	1.462.000	12	15.323.000	120.00	61,29	
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	25.000.000	1	1.400.000	5	13.350.000	0	756.000	0	-	0	756.000	1	2.156.000	2,00	8,62	
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	400	Orang	25.000.000	0	-	1700	106.778.000	320	-	243	-	0	-	563	-	563	-	140,75
		Pemberian Layanan Kedauratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedauratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	25.000.000	0	-	25	44.545.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	25.000.000	0	-	3	11.906.000	0	1.434.000	0	-	0	1.434.000	0	1.434.000	0,00	5,74	
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	101.000.000	23	79.867.000	20	75.200.000	0	762.000	4	6.116.000	0	4	6.878.000	27	86.745.000	54.00	85,89
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantai Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantai Sosial	100	%	375.000.000	0	312.963.900	100	93.234.000	9	14.043.000	4	3.100.000	0	13	17.143.000	13	330.106.900	13,00	88,03 Dinas Sosial P3AP2KB
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	150.000.000	172	312.963.900	58	93.234.000	5	14.043.000	3	3.100.000	0	8	17.143.000	180	330.106.900	180,00	220,07
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Percentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	85	%	79.730.000.000	0	5.626.477.971	85	1.080.372.000	36	3.100.000	0	4.232.000	0	36	7.332.000	36	5.633.809.971	42,35	7,07
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Data Fakir Miskin yang sudah Padan dengan data Kependudukan	94	%	78.700.000.000	0	5.600.683.971	91	1.080.372.000	0	3.100.000	0	4.232.000	0	0	7.332.000	0	5.608.015.971	0,00	7,13 Dinas Sosial P3AP2KB

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2025	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							I	II	III	IV	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5*100	15									
				Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	25.000	Orang	15.000.000.000	20.000	1.602.065.520	5.000	765.778.000	0	1.460.000	0	4.232.000	-	5.692.000	20.000	1.607.757.520	80.00	10,72		
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	65.000	Keharga	3.750.000.000	30.000	440.255.650	10.000	184.600.000	0	1.640.000	0	-	-	1.640.000	30.000	441.895.650	46,15	11,78		
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.050	Orang	3.100.000.000	0	-	50	129.994.000	0	-	0	-	-	0	-	-	-	0,00	0,00	
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	90	%	817.000.000	0	215.069.000	90	177.169.200	100	7.440.000	-	-	-	100	7.440.000	100	222.509.000	111,11	27,23	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100	%	417.000.000	0	117.991.000	100	138.741.200	100	7.440.000	0	-	-	100	7.440.000	100	125.431.000	100,00	30,08 Dinas Sosial P3AP2KB	
				Penyediaan Makanan	250	Orang	167.000.000	143	92.673.000	50	72.506.000	8	7.440.000	5	-	-	-	13	7.440.000	156	100.113.000	62,40	59,95
				Penyediaan Sundang	150	Orang	75.000.000	15	25.318.000	68	66.235.200	0	-	0	-	-	0	-	15	25.318.000	10,00	33,76	
				Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesadapan Bencana Kabupaten/Kota	180	Orang	400.000.000	90	97.078.000	30	38.428.000	0	-	0	-	-	0	-	90	97.078.000	50,00	24,27 Dinas Sosial P3AP2KB	
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	180	Orang	325.000.000	90	97.078.000	30	38.428.000	0	-	0	-	-	0	-	90	97.078.000	50,00	29,87	
				III Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan																			
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	50	%	821.000.000	0	336.413.000	40	250.184.000	0	11.450.000	0	-	-	0	11.450.000	0	347.863.000	0,00	42,37
				Pembentukan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pembentukan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	60	%	191.000.000	0	103.723.000	50	78.551.000	0	5.269.000	0	-	-	0	5.269.000	0	108.992.000	0,00	57,06 Dinas Sosial P3AP2KB
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	30.000.000	1	23.516.000	1	32.780.000	0	2.716.000	0	-	-	0	2.716.000	1	26.232.000	20,00	87,44
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab.Kota	Jumlah SDM yang memprolifik advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	140	Orang	131.000.000	50	80.207.000	35	45.771.000	0	2.553.000	0	-	-	0	2.553.000	50	82.760.000	35,71	63,18
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	35	%	200.000.000	0	70.637.500	25	77.605.000	0	2.931.000	0	-	-	0	2.931.000	0	73.568.500	0,00	36,78 Dinas Sosial P3AP2KB

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2025	Unit Perangkat Daerah Penangung Jawab		
							I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5*100	15		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	144	Organisasi	125.000.000	48	70.637.500	12	77.605.000	0	2.931.000	0	-		
		Pengustatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengustatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	430.000.000	0	162.052.500	100	94.028.000	0	3.250.000	0	-		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	600	Orang	351.000.000	234	162.052.500	50	94.028.000	0	3.250.000	0	-		
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	%	1.004.000.000	0	745.567.142	100	365.173.000	0	2.526.000	40	-		
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Ratio KDRT	0,004	%	404.000.000	0	507.807.992	0,005	162.028.000	0	1.237.000	0,008	-		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Dokumen	204.000.000	3	435.712.000	1	130.000.000	0	-	0	-		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	168	Perangkat Daerah	200.000.000	60	72.095.992	20	32.028.000	0	1.237.000	0	-		
		Penyediaan Layanan Rujukan Korban Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang di setelah	100	%	250.000.000	0	139.115.500	100	87.717.000	0	1.289.000	40	-		
		Penyediakan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapat Layanan Pengaduan	50	Orang	150.000.000	10	21.972.000	20	15.388.000	0	1.289.000	6	-		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Layanan	100.000.000	35	117.143.500	15	72.329.000	0	-	6	-		
		Pengustatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengustatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	15	Kegiatan	350.000.000	1	98.643.650	2	115.428.000	0	0	0	-		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100	Orang	150.000.000	61	98.643.650	80	88.400.000	0	-	0	-		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2025	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I	II	III	IV	K	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5*100	15						
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		Pengintian Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Kewenangan Perempuan Perempuan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengintian Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	100.000.000	0	-	1	27.028.000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00		
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas kualitas hidup	350	Kelompok Masyarakat	504.000.000	0	-	70	17.028.000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00		
		Peningkatan dan Pengembangan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan HAK Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengintian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10	Kegiatan	250.000.000	0	-	1	17.028.000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00 Dinas P3AP2KB		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan Kualitas Kehatama Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Kehatama Kewenangan Kabupaten/Kota	290	Orang	150.000.000	0	-	30	17.028.000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00		
IV Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak																				
		PROGRAM PEMENUHIAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Lembaga dan Anak yang meningkatkan kapasitasnya dalam pemenuhan Kualitas Hidup Hak Anak	675	Lembaga	625.000.000	257	457.007.600	115	181.009.000	0	1.493.000	0	-	0	1.493.000	257	458.500.600	38,07	73,36
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	125.000.000	0	-	100	32.107.000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00 Dinas Sosial P3AP2KB		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	125.000.000	0	-	1	32.107.000	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00		
		Pengintian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengintian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	11	Kegiatan	500.000.000	6	457.007.600	2	148.902.000	0	1.493.000	0	-	0	1.493.000	6	458.500.600	54,55	91,70 Dinas Sosial P3AP2KB
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	350.000.000	3	178.060.600	1	113.902.000	0	1.493.000	0	-	0	1.493.000	3	179.553.600	60,00	51,30
		Pengintian Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengintian Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen	150.000.000	3	278.947.000	1	35.000.000	0	-	0	-	0	-	3	278.947.000	60,00	185,96
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHASUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfrensif	100	%	2.525.000.000	0	569.604.500	100	229.158.000	0	859.000	100	-	100	859.000	100	570.463.500	100,00	22,59
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang di sediakan	100	%	1.400.000.000	0	425.247.500	100	229.158.000	0	859.000	48	-	48	859.000	48	426.106.500	48,00	30,44 Dinas Sosial P3AP2KB

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2025	Unit Perangkat Daerah Penangung Jawab	
							I	II	III	IV	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5*100	15			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Penyelitian Masyarakat Menerikat Perlindungan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan bagi Anak yang Mengadui	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	250	Orang	500.000.000	70	31.654.000	30	14.197.000	0	859.000	12	-		12	859.000
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	325	Layanan	900.000.000	70	393.593.500	25	214.961.000	0	-	12	-		12	-
V	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk																
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	1	%	1.002.000.000	0	354.201.390	1	105.525.000	0	0	0	10.560.000			0	10.560.000
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	15	Kegiatan	577.000.000	3	122.123.000	1	45.525.000	0	0	0	-			0	-
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keharjaan	Jumlah Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keharjaan	45	Laporan	177.000.000	9	50.000.000	9	45.525.000	0	-	0	-			0	-
	Pemetaan Perkiriman Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemetaan Perkiriman Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10	Kegiatan	425.000.000	3	232.078.390	1	60.000.000	0	0	1	10.560.000			1	10.560.000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	45	Dokumen	350.000.000	19	225.503.390	1	60.000.000	0	-	1	10.560.000			1	10.560.000
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	75	%	14.004.000.000	0	6.426.547.179	73	1.965.806.559	0	231.465.000	67	737.311.000			67	968.776.000
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	31	Kegiatan	3.700.000.000	13	2.106.029.329	4	730.030.000	1	67.800.000	2	368.663.000			3	436.463.000
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	10	Laporan	400.000.000	6	267.490.000	2	99.910.000	0	-	0	-			0	-
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyaluran Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyaluran Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana)	54	Laporan	1.300.000.000	27	1.192.059.329	9	350.120.000	1	67.800.000	5	163.130.000			6	230.930.000
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	90	Laporan	850.000.000	54	386.870.000	18	180.000.000	0	-	10	118.093.000			10	118.093.000

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d renja perangkat daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2025	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I	II	III	IV	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5*100	15						
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengembangan Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembentukan Keharga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	5	Dokumen	750.000.000	3	234.595.000	1	100.000.000	0	-	1	87.440.000		1	87.440.000	4	322.035.000	80,00	42,04	
	Cakupan PKB/PLKB yang dilaksanakan Perangkat Daerah KB untuk percepatan dan Peleksaanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	%	3.500.000.000	0	1.613.324.000	100	826.706.559	25	49.650.000	25	295.700.000			50	345.350.000	50,00	1.958.674.000	55,96	Dinas Sosial P3AP2KB
	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	54	Unit	1.000.000.000	18	313.324.000	9	200.506.559	2	49.650.000	2	33.100.000			4	82.750.000	22	396.074.000	40,74	39,61
	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	15.150	Orang	2.000.000.000	6.266	1.300.000.000	303	626.200.000	0	-	101	262.600.000			101	262.600.000	6.367	1.562.600.000	42,03	78,13
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat Kontraspsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	47	%	4.804.000.000	0	1.531.143.850	44	269.970.000	0	80.215.000	34	4.140.000			34	84.355.000	34	1.615.498.850	72,34	Dinas Sosial P3AP2KB
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontraspsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	71	Laporan	100.000.000	39	24.900.000	13	10.800.000	0	-	0	-			0	-	39	24.900.000	54,93	24,90
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kecertakan Penggunaan Metode Kontraspsi Jangka Panjang (MKJP)	2.500	Orang	1.000.000.000	2.063	620.185.000	610	233.070.000	210	80.215.000	52	4.140.000			262	84.355.000	2225	704.540.000	93,00	70,45
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kesehatan dan Kesehatan Reproduksi di Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	75	Laporan	250.000.000	13	22.725.000	13	26.100.000	0	-	0	-			0	-	13	22.725.000	17,33	9,09
	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	100	%	2.000.000.000	0	1.176.050.000	100	139.100.000	23	33.800.000	23	68.808.000			46	102.608.000	46	1.278.658.000	46,00	Dinas Sosial P3AP2KB
	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependidikan, dan Keluarga Berencana)	156	Kampung	2.000.000.000	78	1.176.050.000	26	139.100.000	6	33.800.000	6	68.808.000			12	102.608.000	90	1.278.658.000	57,69	63,93
PROGRAM PEMERDIDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keharga Sasaran yang menjadi anggota BKB, BKR dan BKJ	82	%	10.210.000.000	0	5.134.701.224	79	1.893.122.500	0	0	20	355.680.000			20	355.680.000	20	5.490.381.224	24,39	53,77
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukna pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	%	9.260.000.000	0	4.979.851.224	92	1.893.122.500	0	0	47	355.680.000			47	355.680.000	47	5.335.531.224	47,00	Dinas Sosial P3AP2KB

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti, merupakan pelayanan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di wilayah Kabupaten yang terdiri atas :

- a. Pemberdayaan Sosial
- b. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- c. Rehabilitasi Sosial
- d. Perlindungan dan Jaminan Sosial
- e. Penanganan Bencana
- f. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- g. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan
- h. Perlindungan Perempuan
- i. Peningkatan Kualitas Keluarga
- j. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- k. Pemenuhan Hak Anak
- l. Perlindungan Khusus Anak
- m. Pengendalian Penduduk
- n. Pembinaan Keluarga Berencana
- o. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Pemberdayaan Sosial Meliputi :

- a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) ;
- b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/Kota.

2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan :

- a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

3. Rehabilitasi Sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

- 4. Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi :**
 - a. Pemeliharaan Anak-anak terlantar;
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatannya.
- 5. Penanganan Bencana meliputi:**
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota;
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana kabupaten/Kota.
- 6. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan:**
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- 7. Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Meliputi:**
 - a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b. Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota;
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan Kewenangan kabupaten/Kota.
- 8. Perlindungan Perempuan meliputi :**
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan kabupaten/Kota;
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 9. Peningkatan Kualitas Keluarga meliputi :**
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- 10. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak meliputi :**
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

11. Pemenuhan hak Anak meliputi :

- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota.

12. Perlindungan Khusus Anak meliputi :

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penyediaan layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah kabupaten/Kota;
- c. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten/Kota.

13. Pengendalian Penduduk meliputi :

- a. Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

14. Pembinaan Keluarga Berencana (KB) meliputi :

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

15. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Meranti sejak Tahun 20 sampai 2024 mengalami peningkatan pertumbuhannya. fakta sosial ini menjadi sangat berkembang, dan menjadi ironis ditengah keinginan masyarakat dan zaman menuntut adanya perbaikan kesejahteraan bagi dirinya dengan melihat indikator pertumbuhan ekonomi yang baik, pemahaman teknologi yang makin maju, dan penguatan ekonomi produksi keluarga yang kokoh.

Indikator-indikator kemajuan suatu masyarakat seperti meningkatnya kesejahteraan sosial di masyarakat, Pembangunan keluarga yang berkualitas serta adanya kesetaraan gender dalam segala aspek Pembangunan merupakan jawaban keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang telah di tetapkan.

Adapun kemajuan-kemajuan tersebut antara lain adalah keterjangkauan pelayanan sosial guna menurunkan jumlah PPKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsi sosial PSKS yang tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik masyarakat pada tatanan menengah ke bawah. Selain itu pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni : adanya peningkatan produktivitas PPKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai kepentingan di Kabupaten Meranti telah meningkat cukup signifikan dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, (yakni berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Meranti) dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

- a. Masih sedikitnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi;

- b. Masih sedikitnya orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
- c. Pemberian bantuan Sosial yang belum tepat sasaran;
- d. Belum terjalannya koordinasi yang baik dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- e. Lemahnya jejaring Kerjasama (networking) dengan stakeholders;
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan layanan Kesejahteraan Sosial;
- g. Terbatasnya SDM terlatih dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang responsive Gender;
- h. Masih lemahnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan;
- i. Belum maksimalnya koordinasi, peran dan fungsi gugus tugas KLA dalam pemenuhan Hak-hak Anak;
- j. Belum terjalannya koordinasi yang baik stakeholder terkait dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak;
- k. Masih rendahnya kesertaan pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- l. Belum optimalnya pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
- m. Belum tersedianya Dokumen Grand Design Kependudukan 5 Pilar;
- n. Masih kurangnya kompetensi dari kader Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang memberikan penyuluhan tentang 8 fungsi Keluarga;
- o. Masih rendahnya partisipasi mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan Program Pembangunan Keluarga;
- p. Masih kurangnya kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga.

Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, adapun isu-isu yang kemungkinan dapat muncul adalah sebagai berikut :

- 1. Rendahnya tingkat Kesejahteraan Sosial;
- 2. Kesetaraan Gender dalam segala aspek Pembangunan;
- 3. Mewujudkan Pembangunan Keluarga yang tangguh dan berkualitas.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MERANTI

3.1 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan sedangkan Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu ***“Meningkatnya Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Keluarga, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak”*** dan untuk mencapai tujuan tersebut, dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan sasaran yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya keluarga penerima manfaat yang sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri;
2. Meningkatnya layanan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatnya Kesetaraan Pembangunan Antara Laki-laki dan Perempuan;
4. Meningkatnya kesadaran Masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap Perempuan ;
5. Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Khusus Anak;
6. Meningkatnya Kebutuhan Ber-KB bagi Pasangan Usia Subur;
7. Meningkatnya Pemberdayaan keluarga guna mewujudkan keluarga yang berkualitas; dan
8. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah serta Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan dan Program Prioritas disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial PPPA PPKB
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN						
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Keluarga, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak		Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)	Indeks	56,47	57,23	58,02	58,85	59,64	60,48
			Indeks Ketimpangan Gender (IPG)	Indeks	0,441	0,422	0,403	0,384	0,365	0,346
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	62,93	64,25	65,68	67,16	68,52	70,04
		Meningkatnya keluarga penerima manfaat yang sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	30	34	40	48	58	65
		Meningkatnya layanan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS Yang Tertangani	%	93	94	95	95	95	95
		Meningkatnya Kesetaraan Pembangunan Antara Laki-Laki dan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,78	88,06	88,34	88,62	88,91	89,04
		Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	8,43	8,15	7,84	7,46	7,05	6,58

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN						
				SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,14	65,36	66,57	67,79	69,05	70,33
		Meningkatnya kebutuhan Ber-KB bagi Pasangan Usia Subur	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	88,60	89,10	89,50	89,90	90,30	90,70
		Meningkatnya Pemberdayaan keluarga guna mewujudkan keluarga yang berkualitas	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	48,50	49,40	50,40	51,30	52,50	53,30
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	71,34	72,57	73,76	74,93	76,12	77,32

Tabel 2.2
Arah Kebijakan
Pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026

No.	Misi	Arah kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan
1.	Memperkuat Mutu, Layanan dan Jaminan Pendidikan dan Kesehatan Serta Perlindungan Masyarakat dan Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Industri, Kewirausahaan dan Birokrasi	Penguatan kapasitas kelembagaan perempuan dan anak	<p>Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender</p> <p>Peningkatan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang kesetaraan gender</p> <p>Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus</p> <p>Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya melalui peningkatan kapasitas Forum Anak daerah</p> <p>Memperkuat kerjasama dan sinergitas antara perangkat daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p> <p>Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial</p>
		Penguatan keluarga melalui Penyediaan layanan konseling	<p>Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga</p> <p>Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga</p>

No.	Misi	Arah kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan
			<p>Pengembangan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pengambilan kebijakan</p> <p>Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR</p> <p>Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP)</p> <p>Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah</p> <p>Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD</p>
		Peningkatan Akses Layanan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Responsif	<p>Penguatan dan pengembangan mekanisme insentif bagi SDM Kesos salah satunya melalui peningkatan tali asih</p> <p>Peningkatan jumlah SDM Kesos yang tersertifikasi kompeten</p> <p>Menguatkan kapasitas lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial melalui akreditasi dan pembinaan serta pengawasan berkelanjutan</p> <p>Penguatan data Tunggal terintegrasi yang terupdate secara dinamis</p> <p>Menyajikan data statistik populasi dari kriteria PPKS untuk mempermudah jangkauan intervensi yang tepat sasaran</p> <p>Kolaborasi dan sinergi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan stakeholders</p> <p>Pengembangan Rehabilitasi Sosial yang Efektif untuk Kesejahteraan Sosial</p>

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Matrik Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPOAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPOAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	TARGET 2026	CAPOAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	NASIONAL	DAERAH	14	15	16	17	
		DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						10.871.107.534,00							11.315.296.349,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.161.176.123,00							7.455.696.349,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.161.176.123,00							7.455.696.349,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	-			95 %	4.207.988.583,00						-	4.387.396.349,00		
		[Meningkatnya pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah]	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur, peralatan, barang dan jasa penunjang kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	95	81	95	95	4.207.988.583,00	-	-	-	-	-	-	4.387.396.349,00	-	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disediakan	-				29 Dokumen	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORAMASI TATA KELOLA TRANSFORMASI Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	-	31.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														15.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							9	10	11	12	13	14		15	16		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				22 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		15.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	2.677.857.475,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	-	2.811.750.349,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			300 Orang/bulan	2.677.857.475,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		2.811.750.349,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	312.407.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	-	328.146.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		5.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	55.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		57.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	24.999.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		26.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		15.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.520.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		2.646.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		21.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							8	9	10	11	12	13		15	16	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			39 Laporan	189.888.800,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Bangas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		199.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cekupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	145.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	-	150.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	45.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Bangas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		47.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	60.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		63.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.06.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 Unit	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		40.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Kegiatan	983.371.808,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	-	1.002.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.06.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							8	9	10	11				14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		5.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	139.999.970,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		147.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	838.371.838,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		850.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	59.351.500,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah	-	63.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			28 Unit	39.351.500,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		42.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			40 Unit	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Banglas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFO RMASI TATA KELOLA Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah		21.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Percentase Pekerja Sosial/Tenaga Kependidikan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Iuran Panti Rehabilitasi Sosial	-		100 % 44 %	364.400.000,00						-		382.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		[Meningkatnya pemberdayaan sosial]	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya Dalam Pelayanan Sosial	100 50 60	100 36 38	100 40 42 44	75	100	364.400.000,00	-	-	-	-	-	382.550.000,00	-	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial dan Peningkatan Kapasitas serta Pendampingan	-			70 Keluarga	121.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan perbaikan kemasukan.	TRANSFORMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	127.050.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Keluarga	96.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Merbau, Lukit	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Komunitas Adat Terpencil (KAT)		100.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.06.02.2.01.0004		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota			40 Keluarga	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Pulau merbau, Semukut	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Komunitas Adat Terpencil (KAT)		26.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	-		2 Kegiatan	243.400.000,00			Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	-	255.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.06.02.2.03.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Lembaga	180.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		189.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.06.02.2.03.0014		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Penyalur Sosial, Penyalur Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				9 Orang	63.400.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dan desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		66.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Percentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar dan Gelandangan pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	-			100 %	605.284.740,00						-	635.100.000,00		
		[Meningkatnya rehabilitasi sosial]	Percentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Percentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar dan Gelandangan pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	82.71 88	100	100	605.284.740,00	-	-	-	-	-	-	635.100.000,00	-	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	-			2215 Orang	553.217.740,00			Membangun dan desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gepeng	-	580.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakahan															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	38.700.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dan desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gepeng		40.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaihan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gepeng		52.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			50 Orang	47.160.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gepeng		49.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			10 Orang	19.750.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gepeng		20.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			15 Orang	9.970.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gepeng		10.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	29.970.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gepeng		31.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.06.04.2.01.0008		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			5 Orang	11.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gepeng		11.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.06.04.2.01.0009		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			1900 Orang	66.731.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gepeng		70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.06.04.2.01.0010		Pemberian Layanan Kedauratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedauratan Kewenangan Kabupaten/Kota			10 Orang	21.700.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gepeng		22.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.06.04.2.01.0011		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	17.450.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gepeng		18.300.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			20 Orang	135.356.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gepeng		142.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota			10 Orang	15.450.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gepeng		16.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.04.2.01.0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota			20 Orang	79.994.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gepeng		84.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota			10 Orang	9.986.740,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFOR MASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gepeng		10.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	-		40 Orang	52.067.000,00			Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFOR MASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	54.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			40 Orang	52.067.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFOR MASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		54.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	-		70 %	1.647.399.800,00						-	1.697.600.000,00		
		[Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial]	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	90	62	65	70	1.647.399.800,00	-	-	-	-	-	1.697.600.000,00	-	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di kelola	-		15100 Orang	1.647.399.800,00			Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFOR MASI SOSIAL Transformasi Sosial	Keluarga Miskin	-	1.697.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			5000 Orang	935.399.800,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Keluarga Miskin		950.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			100 Orang	600.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Keluarga Miskin		630.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindikatikan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikari yang dilaksanakan			10000 Usulan	112.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dan desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Keluarga Miskin		117.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	-		100 %	276.103.000,00						-	289.800.000,00		
		[Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana]	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100	100	100	276.103.000,00	-	-	-	-	-	-	289.800.000,00	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-			225 Orang	236.103.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial	-	247.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	130.123.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial		136.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pascabencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	96.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial		100.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	9.980.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial		10.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat dan Relawan Taruna Siaga Bencana yang siap dalam menghadapi Bencana	-			29 Orang	40.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	-	42.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				29 Orang	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)		42.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	-			100 %	60.000.000,00						-	63.250.000,00	
		[Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan]	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	100	100	100	100	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	63.250.000,00	-
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara	-			1 Unit	60.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Taman Makam Pahlawan (TMP)	-	63.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Alah Air	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TRANSFORMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Taman Makam Pahlawan (TMP)		36.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.07.2.01.0005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				300 Orang	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi, Alai Air	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dan desa dan dari bawah untuk perubahan ekonomi, penerapan teknologi dan pembangunan kemandirian.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Taman Makam Pahlawan (TMP)		26.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.709.931.411,00							3.859.600.000,00			
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.120.028.000,00							1.167.950.000,00			
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Percentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	-		35 % 56,25 %	270.000.000,00						-	283.500.000,00			
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	Percentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	65 65.54	27 52.09	30 54.25	35 56.25	270.000.000,00	-	-	-	-	-	283.500.000,00	-		
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	-		3 Kegiatan	95.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Pemerintah	-	99.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Pemerintah		31.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG			1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Pemerintah		26.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8				NASIONAL	DAERAH				
1			jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek			40 Orang	40.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Pemerintah		42.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	-		2 Kegiatan	105.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan	-	110.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8				NASIONAL	DAERAH				
1			Jumlah organisasi kemasayarakatan/profesi/dunia usaha/media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi			12 Lembaga	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan		84.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi			25 orang	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan		26.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							9	10	11	12				15	16		
1	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan pada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	-			1 Kegiatan	70.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	-	73.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota															
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				2 Lembaga	70.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		73.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Percentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPD yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-			100 %	176.256.500,00						-	184.800.000,00		
		[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	Percentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPD yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100	100	176.256.500,00	-	-	-	-	-	-	184.800.000,00	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang disediakan	-		7 Layanan	81.896.500,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Perempuan Korban Kekerasan	-	85.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota			15 orang	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Perempuan Korban Kekerasan		26.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8				NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				15 orang	56.896.500,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Perempuan Korban Kekerasan		59.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.2.03	Pengukuran dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Pengukuran dan Pengembangan pada Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	-		2 Kegiatan	94.360.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-	99.050.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek			70 orang	69.360.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan		72.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.2.03.0009	Pengutaman kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan			1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan		26.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas kualitas hidup	-		3 KPM	17.028.000,00						-	17.800.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak]	Cakupan Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas kualitas hidup	50	0	0	3	17.028.000,00	-	-	-	-	-	-	17.800.000,00	-
	2.08.04.2.02	Penguanan dan Pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Penguanan dan Pengembangan pada Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	-			1 Kegiatan	17.028.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	-	17.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas				1 Lembaga	17.028.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga		17.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH		15	16			
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	-		100 %	20.000.000,00							-	21.000.000,00			
		[Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak]	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	100	0	100	100	20.000.000,00	-	-	-	-	-	21.000.000,00	-			
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		1 Kegiatan	20.000.000,00			Mempertukar pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Data Gender dan Anak	-	21.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia			1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Mempertukar pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Data Gender dan Anak		21.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga dalam pemenuhan Kualitas Hidup Anak yang meningkat kapasitasnya	-		42 %	235.000.000,00						-		246.750.000,00	
		[Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif]	Persentase Lembaga dalam pemenuhan Kualitas Hidup Anak yang meningkat kapasitasnya	75	37	39	42	235.000.000,00	-	-	-	-	-		246.750.000,00	-
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	-			1 Kegiatan	100.000.000,00			Mempertukar pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFOR MASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	-	105.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
		jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					50 Orang	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Mempertukar pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFOR MASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha		105.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELompok SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan pada Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	-			2 Kegiatan	135.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	-	141.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		36.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
							8	9	10	11	NASIONAL	DAERAH					
			jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan			40 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keselarasan gender, serta penguanan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		105.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Percentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	-		100 %	401.743.500,00						-	414.100.000,00			
		[Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak]	Percentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	100	100	100	401.743.500,00	-	-	-	-	-	414.100.000,00	-		
			Percentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8				NASIONAL	DAERAH				
1	2	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang dilakukan dalam upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-		1 Kegiatan	102.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Anak Korban Kekerasan	-	107.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota			1 Dokumen	102.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Anak Korban Kekerasan		107.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diseleksikan	-			8 Layanan	229.743.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	233.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				40 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		52.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8				NASIONAL	DAERAH				
1			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota			40 Orang	179.743.500,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		181.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.2.03	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengurusan dan Pengembangan pada Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	-		1 Kegiatan	70.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	73.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek			50 Orang	70.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	73.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
							2.589.903.411,00							2.691.650.000,00		
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	-		10.8 Angka 2,20 Angka	141.800.000,00						-	148.800.000,00		
		[Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk]	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2.16 8.5-8.3	13.3 2.22	11.9-11.1 2.21	10.8-10.2 2.20	141.800.000,00	-	-	-	-	-	148.800.000,00	-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	1 Kegiatan	80.000.000,00			Mempertukar pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Kuantitas Penduduk	-	84.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-												
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Mempertukar pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Kuantitas Penduduk		84.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-			1 Kegiatan	61.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORASI SOSIAL Transformasi Sosial	Kuantitas Penduduk	-	64.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	61.800.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFORASI SOSIAL Transformasi Sosial	Kuantitas Penduduk		64.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Percentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	-			6,1 % 72,15 %	640.527.711,00					-	669.900.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH		15	16			
1		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	4.5 80.05	6.5 67.70	6.3 70.23	6.1 72.15	640.527.711,00	-	-	-	-	-	-	669.900.000,00	-		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	-			2 Kegiatan	212.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penduduk	-	222.850.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				9 Laporan	135.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penduduk		141.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8				NASIONAL	DAERAH				
1			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			1 Dokumen	77.250.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Penduduk		81.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Pelugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	-		100 %	155.195.711,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Tenaga Penyuluhan KB/Pelugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	167.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							8				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia			7 Unit	155.195.711,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Tenaga Penyuluhan KB/Pelugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		167.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cukupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	-		100 %	273.082.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	-	279.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				13 Laporan	11.700.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi		12.250.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesiagaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				703 Orang	245.782.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi		251.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				13 Laporan	15.600.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi		16.300.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	-		26 %	1.807.575.700,00						-	1.872.950.000,00		
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)]	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	57	17	22	26	1.807.575.700,00	-	-	-	-	-	1.872.950.000,00	-	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	-		95 %	1.807.575.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Pembangunan Keluarga	-	1.872.950.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				2 Laporan	92.571.750,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Pembangunan Keluarga		97.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				150 Orang	84.803.950,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengaruh peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Pembangunan Keluarga		85.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			12	13	14	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	NASIONAL	DAERAH	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Penitipan dan Pendapatan Kedutaan Aksesor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				741 Orang	1.630.200.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Mempertkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keselarasan gender, serta penguanan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TRANSFO RMASI SOSIAL Transformasi Sosial	Pembangunan Keluarga			1.690.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		J U M L A H					10.871.107.534,00									11.315.296.349,00		

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Rencana program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

b. Program Pemberdayaan Sosial

1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT;

- Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan.
- 2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Rehabilitasi Sosial

- 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan;
 - Penyediaan Sandang;
 - Penyediaan Alat Bantu;
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
 - Pemberian Layanan Kedaruratan;
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
 - Pemberian Layanan Rujukan;
 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan.
- 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NaPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Rujukan.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Penanganan Bencana

1. Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan;
 - Penyediaan Sandang;
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

g. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota.

g. Program Perlindungan Perempuan

1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota;
 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

h. Program Peningkatan Kalitas Keluarga

1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

i. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota.

j. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan

Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

- Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
- Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

i. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
2. Penyediaan Layanan Bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota;
 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota.
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

j. Program Pengendalian Penduduk

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

k. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana;

- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal.
- 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
- 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;

I. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA));
 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA));
 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026, usulan program dan kegiatan masyarakat, pengalaman pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sampai dengan saat ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini juga merupakan penjabaran dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Meranti Tahun 2026.

Dengan demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus didukung oleh:

1. Komitmen dari unsur pimpinan yang kuat dan bersinergi ;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
3. Peran serta masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha secara aktif;
4. Sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.

Kedepan, melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen dan aparatur, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan menjadi sebuah Dinas yang mampu memberikan Pelayanan Bagi Masyarakat yang membutuhkan.

Akhirnya apa yang disusun dalam wujud Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (Clean Governance and Good Goverment) dan semoga bermanfaat.